

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Amal, Bakhrul. 2017. *Pengantar Hukum Tanah Nasional: Sejarah, Politik dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Thafa Media
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Pengusahaan Batam. 2014. *Mengungkap Fakta Pembangunan Batam: Era B.J. Habibie*. Batam: BP Batam.
- Etzioni-Halevy, Eva. 2011. *Birokrasi & Demokrasi: Sebuah Dilema Politik*. Yogyakarta: Total Media.
- Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnson, Doyle Paul. 1989. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Komari, Cak Ta'in. 2017. *Provinsi Khusus Barelang: Solusi Permanen Masalah Batam*. Batam: Kelompok Diskusi Anti 86.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit GHALIA Indonesia.
- Panjaitan, Halomoan. 2014. *Kumpulan Skematis Peraturan Pertanahan & Hak Pengelolaan Di Pulau Batam*. Batam: BP Batam.
- Plumer, Ken. 2011. *Sosiologi The Basics*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Poloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George & Douglas J Goodman. 2011. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roeroe, Fredy. Et al. 2003. *Batam, Komitmen Setengah Hati*. Bekasi: Aksara Karunia.

Seda, Frans. 2003. *Membangun Indonesia: Studi Kasus Batam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: ALFABETA.

Sutedi, Adrian. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Weber, Max. 2006. *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Widjaja, H.A.W. 2014. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Press.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Yin, Robert K. 2005. *Studi Kasus Design & Metode*. Jakarta: Rajawali Press.

### **Skripsi:**

Hendri. 2014. *Dualisme Kewenangan KPUD Dan PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Penentuan Kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Studi Pemilukada Bangkalan Madura Periode 2013-2018)*. Padang: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Pratama, Ari. 2016. "*Pemberian Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Di Kota Batam*". Padang: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Oktahade, Satria. 2018. "*Dinamika Kekuasaan Di Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam: Keterlibatan Aktor Politik Dalam Konflik Kewenangan Antara BP Batam Dengan Pemko Batam*". Padang: Skripsi Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas.

### **Jurnal Penelitian dan Dokumen Resmi:**

Djuita, Ratna. 2011. *Hak Pengelolaan (HPL) Antara Regulasi Dan Implementasi*. Jakarta: Jurnal Pertanahan, Vol. 1 No. 1.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. 2014. *Kajian Kelembagaan dan Tata Kelola BP Batam*.

Badan Pusat Statistik Kota Batam. 2018. *Kota Batam Dalam Angka*.

- Khairina Malinda, Wan. 2017. *Konflik Lahan Kampung Tua Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2004-2016*. Pekanbaru: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 4 No. 1.
- Murti, Muhammad Sapta. 2014. *Urgensi Otonomi Khusus Batam Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015*. Bandung: Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 2.
- Rahmi, Elita. 2010. *Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah ( HPL) Dan Realitas Pembangunan Indonesia*. Jambi: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3.
- Saprial. Setiawan, Bakti. dan Wijono, Djoko. 2004. *Konflik Lingkungan Di Kampung Agas, Tanjung Uma, Batam*. Yogyakarta: Jurnal Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, Vol. XI, No. 3.
- Yelta, Den. 2015. *Implikasi Free Trade Zone Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Suatu Kajian Bisnis Internasional Di Provinsi Kepulauan Riau)*. Jurnal Transnasional, Vol. 7, No. 1.
- Zaenuddin, Muhammad. Kumorotomo, Wahyudi. Et al. 2017. *Dualisme Kelembagaan Antara Pemerintah Kota Dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam*. Batam: Journal of Business Administration Vol 1. No. 2.

**Internet:**

- <http://www.pu.go.id/isustrategis/view/7> (Diakses 30 Juli 2018)
- <http://www.Batamreport.com/2016/01/lira-tuntut-bp-batam-dibubarkan.html?m=1> (Diakses 3 April 2018)
- <http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/09/19/odqoqk368-komisi-ii-cari-solusi-tumpang-tindih-kewenangan-di-batam> (Diakses 3 April 2018)
- <https://bpbatam.go.id> (Diakses 3 April 2018)
- <https://kbbi.web.id/> (Diakses 29 Juli 2018)
- <https://batampos.co.id/2018/04/06/walikota-batam-keluhkan-dualisme/> (Diakses 23 April 2018)
- <https://youtu.be/iUH5nDduv6o> (Diakses 5 Januari 2019)
- <https://batampos.co.id/2019/01/21/ekonomi-batam-melambat-pada-2019-prediksi/> (Diakses 28 Oktober 2019)

<https://www.jawapos.com/jpg-today/06/01/2019/target-pbb-di-batam-tercapai-97-persen/> (Diakses 28 Oktober 2019)

### **Undang-Undang:**

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan PBPB Batam.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 Tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam.

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Pembentukan Otorita Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Kotamadya Batam Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penggunaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.



Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 Tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam.

Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 9-VIII-1993 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Pulau lain di sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai jenis dan hierarki, dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

